

MOTIF PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR DI PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR: STUDI KASUS DI KECAMATAN SANGKARRANG TAHUN 2020

Andi Mardaya^{1*}, Rahmat Muhammad², Suparman Abdullah³, Lukman Rais⁴, Bustamin Wahid⁵

¹Program Studi Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

^{2,3}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: andimardaya.sos@gmail.com

Citation (APA):

Mardaya, A., Muhammad, R., Abdullah, S., Rais, L., & Wahid, B. (2023). Motif Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir di Pemilihan Wali Kota Makassar: Studi Kasus di Kecamatan Sangkarrang Tahun 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 131–140. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2936>

Email Authors:

andimardaya.sos@gmail.com
rahmatmuhammad131@gmail.com
mansosi087@yahoo.com
lukmanrais28@gmail.com
bustaminwahid0@gmail.com

Submitted: 24 November 2023

Accepted: 08 Desember 2023

Published: 23 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Andi Mardaya, Rahmat Muhammad, Suparman Abdullah, Lukman Rais, Bustamin Wahid

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif partisipasi politik masyarakat pesisir di Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020, khususnya di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deksriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, dimana terdapat 6 (enam) informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Motif partisipasi politik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor, termasuk kesengajaan, emosional, internal, eksternal, dan pertimbangan rasional. Kesengajaan muncul dari pemahaman dan kesadaran individu akan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam proses pemilihan umum. Sementara itu, faktor emosional terkait dengan hubungan personal atau identitas bersama, dan dalam beberapa situasi, partisipasi dapat dipengaruhi oleh kesamaan suku dan identitas tanpa adanya paksaan. Beberapa orang juga terlibat dalam proses pemilihan karena keterlibatan emosional dengan calon tertentu. Motif partisipasi juga dapat muncul dari kebutuhan sosial akan kepemimpinan komunal dan pengaruh eksternal, seperti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu.

Kata kunci : *Motif; Partisipasi Politik; Masyarakat Pesisir*

ABSTRACT

This research aims to analyze the motives of political participation among coastal communities in the 2020 Makassar Mayoral Election, particularly in the Sangkarrang Islands Subdistrict. The research method employed is qualitative with a descriptive type. The informant selection technique used is nonprobability sampling with purposive sampling, where 6 informants were chosen based on specific criteria and their ability to answer research questions. The research findings indicate that political participation motives can be categorized into several factors, including intentionality, emotional factors, internal factors, external factors, and rational considerations. Intentionality arises from the understanding and awareness of individuals regarding the contribution they can make to the general election process. Meanwhile, emotional factors are related to personal relationships or shared identity, and in some situations, participation can be influenced by ethnic similarities and identity without coercion. Some individuals also engage in the election process due to emotional involvement with specific candidates. Motives for participation can also stem from social needs for communal leadership and external influences, such as political education organized by election organizers..

Keywords: *Motif; Political Participation; Coastal Society*

PENDAHULUAN

Salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pengelolaan pemerintah adalah Indonesia. Abraham Lincoln (Reynolds, 2001) demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem

pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat, yang memiliki hak dan peluang setara dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, salah satu persyaratan kunci untuk mewujudkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Pada tingkat individu, setiap warga memiliki hak untuk dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat, serta memilih pemimpin mereka langsung sesuai dengan preferensi masing-masing.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017, diatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, yang merupakan sarana untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum ini dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh wilayah NKRI, berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu menjadi cerminan dari sistem pemerintahan demokratis di Indonesia, yang ditandai oleh partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik ini mencakup keterlibatan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka (Surbakti, 2007).

Pada tahun 2020, Kota Makassar menyelenggarakan pemilihan wali kota secara langsung. Sebelumnya, pada tahun 2018, hanya terdapat satu pasangan calon, dan hasilnya menunjukkan kemenangan bagi kotak kosong. Kotak kosong berhasil meraih dukungan sebanyak 300.795 suara, sedangkan calon tunggal hanya memperoleh 264.245 suara. Total suara yang terkumpul dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar mencapai 565.040 suara. Selisih suara antara kotak kosong dan calon tunggal mencapai 36.898 suara. Persentase perolehan suara kotak kosong mencapai 53,23%, sementara calon tunggal, Appi-Cicu, yang didukung oleh 10 partai besar, memperoleh suara sebanyak 46,77% (Kompas, 2018).

Partisipasi politik adalah elemen kunci dalam kerangka negara demokratis dan juga merupakan atribut khas modernisasi politik dalam konteks demokrasi. Partisipasi politik memiliki dampak signifikan pada dinamika pemerintahan. Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh masyarakat terhadap pasangan calon yang terpilih (Husain, 2021). Dalam setiap pemilihan umum, masa depan pejabat publik yang terpilih sangat bergantung pada pilihan yang dibuat oleh masyarakat sebagai pemilih. Lebih dari itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dapat dianggap sebagai bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan.

Saat ini, partisipasi politik telah menjadi salah satu aspek krusial dalam konteks demokrasi. Partisipasi politik memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat mencerminkan kepentingan individu untuk menentukan pilihan mereka. Selain itu, partisipasi politik juga memiliki kaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis tertuju pada partisipasi politik masyarakat pesisir di Kota Makassar pada tahun 2020.

Secara geografis, komunitas nelayan adalah kelompok masyarakat yang bermukim, berkembang, dan tumbuh di daerah pesisir, yakni wilayah yang terletak di antara daratan dan laut. Sama halnya dengan masyarakat di desa, komunitas pesisir atau nelayan menghadapi sejumlah tantangan politik, sosial, dan ekonomi. Beberapa dari tantangan tersebut mencakup: (1) ketidaksetaraan sosial dan tekanan ekonomi

yang terus-menerus, (2) keterbatasan dalam mengakses modal, teknologi, dan pasar yang memengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan dalam fungsi kelembagaan sosial-ekonomi yang ada, (4) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, (5) degradasi sumber daya lingkungan, baik di daerah pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan (6) kebijakan yang belum cukup kuat dalam mengarah pada kemaritiman sebagai landasan utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006). Demikian pula, situasi yang serupa terjadi di komunitas pesisir kota Makassar, yang secara administratif berada di Kecamatan Sangkarrang dan menghadapi masalah serupa.

Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat pesisir atau nelayan seringkali masih rendah, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang membuat masyarakat cenderung lebih memprioritaskan pekerjaan daripada terlibat dalam urusan politik. Kurangnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi, misalnya ketika pelaksanaan pemilihan umum bertepatan dengan waktu nelayan sedang melaut. Pada situasi tersebut, mereka lebih memilih untuk mencari nafkah daripada menunda aktivitas melaut untuk berpartisipasi dalam pemilihan (Damsar, 2010). Namun, paradoks terlihat pada pemilihan Wali Kota Makassar, di mana tingkat partisipasi di Kelurahan Barrang Lompo justru sangat tinggi, mencapai 70 persen. Sebaliknya, di Kecamatan yang terletak di pusat perkotaan seperti Wajo dan Ujung Pandang, tingkat partisipasinya hanya sekitar 45-50 persen. Fenomena ini menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan kajian mendalam terkait tingginya partisipasi pemilih di wilayah pesisir.

Partisipasi politik masyarakat pesisir telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam menentukan pemimpin mereka. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya memberikan suara dalam pemilihan umum semakin meningkat. Meskipun tidak semua warga memahami sepenuhnya siapa yang mereka pilih, mereka tidak mengabaikan hak pilih mereka sebagai warga negara. Ada alasan tertentu mengapa mereka menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum tahun 2020, menghasilkan perbedaan dalam tingkat partisipasi dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2018 yang dimenangkan oleh kotak kosong dengan selisih sebesar 0,7 persen. Pada Pilkada Makassar 2013, tingkat partisipasi pemilih mencapai 59,94%. Namun, pada tahun 2018, partisipasi pemilih mengalami penurunan sekitar dua poin menjadi 57,02%, atau sekitar 584.406 orang yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1,01 juta orang (Media Indonesia, 2018).

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi politik pemilih di Kota Makassar mencapai 59,66 persen. Kelurahan Lakkang di Kecamatan Tallo memimpin dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi, yakni sebesar 88,79 persen. Menariknya, Kelurahan Barrang Lompo masuk dalam 10 besar kelurahan dengan tingkat partisipasi politik tinggi, mencapai 74 persen. Wilayah ini menjadi perhatian khusus dalam penelitian karena merupakan salah satu daerah masyarakat pesisir. Di sisi lain, tingkat partisipasi terendah terdapat di daerah perkotaan di Kecamatan Wajo dan Ujung Pandang, dengan rata-rata tingkat partisipasi sekitar 45-50 persen (Detik News, 2021).

Berdasarkan pemilihan wali kota, masyarakat pesisir terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, seperti menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengikuti kampanye, sosialisasi,

atau kegiatan yang diadakan oleh calon, serta menjadi bagian dari tim sukses salah satu calon wali kota. Namun, hal ini dapat bertambah seiring dengan kajian dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana motif partisipasi politik masyarakat khususnya pada wilayah pesisir yang secara geografis masuk di Kecamatan Sangkarrang yang terdiri dari Kelurahan Barrang Lompo dan Kelurahan Barrang Caddi dan Kelurahan Kodingareng.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Syaifudin S. Kasim, Peribadi pada tahun 2021 di Desa Sama Bahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat suku Bajo terhadap pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan politik, aspek sosial ekonomi, pengaruh partai politik, tim kampanye, figur calon, dan praktik politik uang. Partisipasi politik diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, bergabung dengan tim sukses calon, dan sebagainya. Pertimbangan ekonomi dan praktik politik uang menjadi motivasi utama dalam partisipasi politik. Penelitian Betrix Priscilla Fermandez pada tahun 2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sosial ekonomi, tingkat pengetahuan politik, serta hambatan internal dan eksternal mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis yang lebih mendalam terkait bentuk partisipasi masyarakat pesisir.

Penelitian Swastiani Dunggio dan Iskandar N. Yantu pada tahun 2021 di Kabupaten Bone Bolango, Tengah Pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di Kecamatan Bulango Selatan dinilai baik. Faktor-faktor seperti asal daerah calon dan visi-misi pasangan calon memengaruhi perilaku pemilih. Namun, penelitian ini berfokus pada tindakan sosial pemilih dan motifnya dalam partisipasinya dalam pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020, terutama di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif partisipasi politik masyarakat pesisir di Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020, khususnya di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

METODE

Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, dengan alasan utama melihat tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi di kalangan masyarakat pesisir. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena dianggap sebagai area yang menarik untuk memahami faktor-faktor pendorong tingginya partisipasi politik di kalangan masyarakat pesisir. Penelitian ini dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2023. Dengan pemilihan lokasi dan waktu yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terkait motif partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020 di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. McMillan dan Schumacher (Siyoto, Sandu, Sodik, & Ali, 2015) mengatakan metode kualitatif secara mendasar bergantung pada observasi terhadap individu dalam konteksnya sendiri serta interaksi dengan mereka menggunakan bahasa dan terminologi yang digunakan dalam lingkungannya. Lalu Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pengkajian fenomena secara lebih rinci dan membedakannya dengan fenomena yang lain (Rasimin, 2018) sementara Jenis penelitian yang digunakan

adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus, yang dapat melibatkan kejadian, program, aktivitas, proses, atau lebih dari satu individu. Peneliti mengumpulkan data dengan berbagai metode pengumpulan data (Creswell, 2018).

Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel data dengan pertimbangan khusus. Dalam konteks penelitian ini, informan yang terlibat adalah masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, terdapat 6 (enam) informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Proses analisis data dimulai dengan tahap reduksi, diikuti oleh penyajian data, dan verifikasi. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan Uji keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih sehingga melahirkan motif politik. Motif politik itu akhirnya mengarahkan Masyarakat untuk bertindak atas pilihan pilihannya, baik secara rasional atau tradisional. Motif politik dalam partisipasi Masyarakat pesisir dalam pemilihan walikota Makassar dibahas berikut:

Faktor sengaja atau tak sengaja.

Pengertian motif partisipasi seseorang dalam konteks ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Partisipasi yang dilakukan secara sengaja menunjukkan kesadaran dan niat dari individu tersebut. Contohnya adalah upaya aktif dalam mencari informasi terkait pemilihan walikota Makassar tahun 2020, dengan tujuan untuk memahami persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Dalam teori Tindakan Sosial, motif politik yang dilakukan secara sengaja oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional. Artinya, keputusan untuk berpartisipasi didasarkan pada pertimbangan dan pemikiran yang sadar. Alasan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dianggap sebagai tindakan sosial yang dilakukan secara sengaja.

Dalam konteks masyarakat pesisir, motif partisipasi juga dapat dijelaskan sebagai tindakan rasional. Meskipun mereka memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan, mereka secara sengaja meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pemilihan, terutama pada tahapan kampanye hingga perhitungan suara. Fokus utama partisipasi terletak pada saat pemilihan, dan hal ini dapat diartikan sebagai tindakan rasional yang dilakukan dengan pertimbangan matang.

Hasil wawancara dengan pihak penyelenggara menunjukkan bahwa mereka serta pemerintah memiliki keterlibatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan mendorong motif partisipasi masyarakat secara sengaja melalui penyediaan pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga mereka dapat terlibat secara sadar dalam proses politik, terutama dalam konteks

pemilihan walikota. Hal itu dapat dilihat pada wawancara SS (40 tahun) yang merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tanggal 18 Juli 2023 yang mengatakan:

Kami dari penyelenggara secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dengan himbuan yang massif untuk datang memilih pada hari H sehingga bisa dilihat angka partisipasi masyarakat pulau itu tinggi. Kami kolaborasi dengan pemerintah, para punggawa dan nelayan untuk libur dulu 1 hari untuk pemilihan. Kami cukup terbantu dengan himbuan pemerintah dan para punggawa itu. Yang meskipun hanya 60 persen yang bisa ikut memilih karena ada beberapa nelayan yang melautnya pulang 6 bulan sekali, ke Kalimantan, di Tenggara dan Maluku.

Berdasarkan informasi tersebut, motif partisipasi yang sengaja didesain oleh pemerintah beserta penyelenggara bertujuan untuk mendorong masyarakat agar aktif dalam proses pemilihan, mulai dari tahap sosialisasi, kampanye, hingga saat pencoblosan. Desain ini mencerminkan upaya sistematis untuk membentuk pemahaman dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan dasar terkait pemilihan, kampanye bertujuan untuk memotivasi dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon, sementara proses pencoblosan merupakan langkah konkret dalam mengekspresikan partisipasi politik. Pada wawancara HD (56 tahun) yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan:

Tentunya sangat penting untuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat sehingga mereka datang memilih. Apakah mereka sudah terdata, kami bantu dengan melaporkan beberapa nelayan saya yang belum terdata. Juga apakah mereka mendapat panggilan untuk memilih. Saya dulu libur 2 hari untuk persiapan itu karena ini sangat penting dalam memilih pemimpin. Penyelenggara juga cukup cepat jika ada masyarakat sini yang tidak terdata atau pindah memilih. Karena terus terang ada beberapa masyarakat yang sudah pindah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh, tergambar suatu pemahaman bahwa masyarakat Kepulauan Sangkarrang dan Pemerintah Kecamatan sampai Kelurahan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan ini terjadi pada motif partisipasi yang mulai muncul di masyarakat, yang menunjukkan bahwa mereka sudah sadar dan paham akan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam proses pemilihan umum. Pemahaman ini mencerminkan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. Adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kontribusi mereka dalam pemilu bisa menjadi salah satu hasil dari program kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Rasional atau emosional

Motif rasional didasarkan pada pertimbangan yang logis dapat mendorong seseorang untuk melakukan evaluasi dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai opsi untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks pemilihan Wali Kota Makassar, penulis melakukan analisis dengan mewawancarai masyarakat untuk mengetahui apakah mereka memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional atau dipengaruhi oleh emosi. Berdasarkan wawancara OD (38 tahun) yang merupakan tokoh pemuda mengatakan:

Kalo saya melihat motif masyarakat dalam memilih karena anjuran dari tokoh masyarakat atau dimana dia bekerja atau mengutang (ikut sama *punggawanya*). Saya melihat hal tersebut karena jika tidak datang memilih, bos *punggawanya* akan mengancam karena utangnya ada disitu. Tau sendiri bagaimana dipulau, masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai nelayan patuh kepada bos *punggawanya*. Saya melihat hal tersebut karena masyarakat pesisir, utamanya nelayan ini ikut sama bosnya. Jadi mereka ikut saja dengan bosnya, sehingga saya bilang itu motifnya dalam memilih dan rata-rata sudah ada pilihannya dan bos *punggawanya* biasa meliburkan nelayannya (Wawancara, 18 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut motif partisipasi politik masyarakat pesisir terlihat berasal dari tekanan emosional dan dorongan yang datang dari tokoh-tokoh masyarakat. Ekspresi dari motivasi ini didasari oleh kepentingan tanpa mempertimbangkan rasionalitas. Hal itu juga dijelaskan oleh informan HU (59 tahun) pada wawancara 18 Juli 2023 yang mengatakan *“kalo menurut saya masyarakat ikut memilih karena keluarganya menjadi tim pemenang sehingga mereka ikut, ada juga yang memilih karena kesamaan suku, yang pada umumnya di pulau ini rata-rata orang makassar dan mandar sehingga memilih paslon yang sama, apalagi jika tim partai dan pemenangnya jadi peluncur dan membagikan uang”*. Hal itu juga dilanjutkan oleh informan SD (28 tahun) pada wawancara 24 Juli 2023 yang mengatakan *“yahh mereka memilih karena di dorong solidaritas kekeluargaan, apalagi penggeraknya ini keluarganya. Meskipun temuan politik uang itu tidak ada, tetapi ada sembako yang sempat saya lihat tetapi tidak signifikan. Sehingga saya melihat hal itu membuat masyarakat nelayan ke TPS memilih.”*

Oleh karena itu, penulis menemui berbagai tanggapan dari masyarakat, dan data yang dihimpun dari wawancara menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang memilih berdasarkan keterikatan emosional, baik itu dalam hubungan keluarga maupun kesamaan identitas dengan pasangan calon. Walaupun begitu, penulis juga menemukan bahwa jumlah pemilih yang mengambil keputusan secara rasional cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memilih berdasarkan hubungan emosional. Dalam kerangka teori tindakan sosial, partisipasi ini termasuk dalam kategori afektif yang menggambarkan tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa melibatkan refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu (Ritzer, 2010). Hal itu yang menjadi realitas dalam melihat motif partisipasi politik masyarakat pesisir di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Diarahkan dari dalam atau dari luar

Motif partisipasi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keinginan yang kuat atau rasa ingin tahu terhadap prosedur pemilihan umum, terutama terlihat pada partisipasi pemilih pemula. Selain itu, motif partisipasi juga dapat berasal dari pengaruh eksternal, seperti motivasi sosial yang diterapkan oleh Partai Politik, dalam skala kecamatan adalah tim pemenang dan simpatisan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dalam wawancara dengan SS (40 tahun) yang merupakan Panwaslu di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada 22 Juli 2023 disebutkan bahwa *“saya secara aktif dengan tim melakukan sosialisasi pendidikan politik dalam tiga bulan, berpindah dari pulau ke pulau. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membuka pemahaman masyarakat terhadap politik sebagai kontribusi mereka untuk menentukan masa depan selama lima tahun ke depan. Dimulai dari kolaborasi dengan pihak kelurahan, pembagian APK juga.”*

Sementara itu ada peran partai politik, dalam hal ini tim pemenang dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, terutama selama kampanye yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa kampanye dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak pada pemilihan wali kota. Hal itu dijelaskan oleh HD (56 tahun) yang mengatakan:

Saya aktif mengaktifkan tim pemenang di tingkat kelurahan, dari Kelurahan Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Lompo dan Kelurahan Kodingareng. Tim itu bergerak dan kampanye, bahkan membagikan APK dan sosialisasi calon andalan saya. Dimulai dari keluarga sendiri, kelompok nelayan, saya dekati punggawanya. Hal ini penting sehingga menarik simpati pemilih. Apalagi nelayan itu sangat sedikit waktunya karena kesibukan melaut sehingga kami sangat memohon untuk bosnya untuk menggunakan hal pilihnya (Wawancara, 20 Juli 2023)

Sehingga secara rasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir diperlukan upaya kerja keras dari tim pemenang dalam meyakinkan menggunakan hal pilihnya. Dalam teori motif politik dijelaskan untuk meningkatkan partisipasi menggunakan paksaan dan disengaja sehingga masyarakat memberikan hak suaranya (Efriza, 2012).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga ikut berperan dalam memicu partisipasi masyarakat dari luar. Berdasarkan wawancara dengan penyelenggara OD (38 tahun) pada wawancara 18 Juli 2023 menjelaskan bahwa "KPU melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti pemasangan iklan di pinggir jalan, dialog interaktif di stasiun radio RRI, dan pemanfaatan media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. Sosialisasi dilakukan untuk mengajak masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu kami lakukan supaya meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya pemilihan".

Sementara itu pada wawancara dengan masyarakat menunjukkan beragam pandangan mengenai motif partisipasi, ada yang mengikuti pemilihan karena keinginan pribadi tanpa paksaan, sementara yang lain mengakui pengaruh sosialisasi dari sebagai faktor motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Hal itu dijelaskan oleh SD (28 tahun) mengatakan:

Menurut saya motif partisipasi masyarakat dalam memilih dipengaruhi oleh keinginan pribadi karena alasan suka dengan calon tersebut, sama sukunya dan suka membantu. Termasuk juga saya melihat karena ada andilnya KPU yang terus berjalan sosialisasi. Sehingga saya melihat hal tersebut, meskipun saya melihat masih banyak politik uang tapi sudah dianggap biasa yang tidak diperhatikan oleh panwaslu jika tidak ada laporan yang masuk sehingga kita tidak bisa melihat itu sebagai salah satu motif politik meskipun itu menurut saya bisa (Wawancara, 24 Juli 2023)

Sehingga berdasarkan hal tersebut tindakan sosial yang dilakukan dalam konteks motif partisipasi politik sangat bervariasi dimana motifnya karena unsur kesamaan suku dan identitas, tidak ada unsur paksaan tetapi lebih dari balas budi. Sementara ada yang mengatakan karena sosialisasi dari penyelenggara dan partai politik. Dengan demikian, pada Pemilu Tahun 2020, terlihat banyak upaya dari berbagai pihak, termasuk Partai Politik, dan KPU, dalam mendukung motif partisipasi masyarakat melalui sosialisasi mengenai pentingnya berpartisipasi dalam proses politik pemilihan kepala daerah.

Berpikir atau tanpa berpikir

Setiap individu menunjukkan tingkat kesadaran yang berbeda saat terlibat dalam tindakan politik. Beberapa orang cenderung merencanakan partisipasi politik dengan matang sebelum membuat keputusan, sementara yang lain lebih cenderung memilih secara spontan tanpa mempertimbangkan secara mendalam. Selama Pemilihan Walikota di Kota Makassar pada tahun 2020, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu. Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang cenderung memilih berdasarkan kesamaan identitas, yang menyebabkan mereka memilih tanpa memikirkan secara mendalam.

Berdasarkan gambaran di atas, motif partisipasi politik masyarakat cenderung bersifat emosional, dipengaruhi oleh kebutuhan sosial, dan didorong oleh faktor eksternal. Analisis terhadap data wawancara dengan Informan HA (58 tahun) pada 21 Juli 2023 yang mengatakan “*mereka ikut berpartisipasi karena sengaja dan sudah mengetahui calonnya. Ada juga yang dikenalkan oleh tim dan setuju ikut karena keluarga*”. Sehingga beberapa berpartisipasi dengan kesadaran dan niat yang disengaja, sementara yang lain terlibat karena keterlibatan emosional dengan calon tertentu. Motif partisipasi juga muncul karena kebutuhan sosial akan kepemimpinan komunal dan pengaruh dari luar, seperti pendidikan politik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa motif partisipasi yang mulai muncul di masyarakat karena kesadaran dan paham akan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam proses pemilihan umum. Pemahaman ini mencerminkan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. Selanjutnya motif partisipasi politik karena faktor emosional, yang mungkin terkait dengan hubungan pribadi atau identitas bersama. Hal ini mencerminkan bahwa aspek emosional memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan memilih di Kepulauan Sangkarrang. Selanjutnya motif partisipasi politik karena unsur kesamaan suku dan identitas, tidak ada unsur paksaan tetapi lebih dari balas budi. Sementara ada yang mengatakan karena sosialisasi dari penyelenggara dan partai politik. Lalu motif selanjutnya karena adanya kesadaran dan niat yang disengaja, sementara yang lain terlibat karena keterlibatan emosional dengan calon tertentu. Motif partisipasi juga muncul karena kebutuhan sosial akan kepemimpinan komunal dan pengaruh dari luar, seperti pendidikan politik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu.

SIMPULAN

Motif partisipasi dalam pemilihan umum dapat dibagi menjadi beberapa faktor, antara lain faktor kesengajaan, emosional, internal, dan eksternal, serta faktor pertimbangan rasional. Kesengajaan muncul dari kesadaran dan pemahaman individu akan kontribusi yang dapat mereka berikan dalam proses pemilihan umum. Sementara faktor emosional terkait dengan hubungan pribadi atau identitas bersama, dan dalam beberapa kasus, motif partisipasi dapat dipengaruhi oleh kesamaan suku dan identitas tanpa adanya unsur paksaan, lebih bersifat sebagai balas budi. Motif lainnya adalah kesadaran dan niat yang disengaja, di mana beberapa individu terlibat dalam pemilihan umum karena memiliki kesadaran dan niat yang kuat. Sementara itu, ada yang terlibat karena keterlibatan emosional mereka dengan calon tertentu. Motif

partisipasi juga dapat muncul dari kebutuhan sosial akan kepemimpinan komunal dan pengaruh eksternal, seperti pendidikan politik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2018). *Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Detik News. (2021, Juni 07). *Detik*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-5324161/partisipasi-pilwalkot-makassar-5966-tertinggi-di-pulau-tengah-kota>
- Efriza. (2012). *Political Explore (Sebuah Kajian Ilmu Politik)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Husain, M. N. (2021). Bureaucracy Involvement in Local Election In Konawe Selatan District. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)*, 1 (1), 52-58.
- Kompas. (2018, Juli 07). *KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018*. Diambil kembali dari <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018?page=all>
- Kusnadi. (2006). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta. *Ar-RuzzMedia, Pusta Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Lembaga Penelitian, Universitas Jember*.
- Media Indonesia. (2018, Juli 07). *Partisipasi Pemilih Pilkada Makassar Menurun di 2018*. Diambil kembali dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/170778/partisipasi-pemilih-pilkada-makassar-menurun-di-2018>
- Rasimin. (2018). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Kualitatif*. Salatiga: Trusmedia Grafika.
- Reynolds, A. (2001). *Merancang Sistem Pemilihan Umum dalam Juan J. Linz, et.al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan.
- Ritzer, G. (2010). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siyoto, Sandu, Sodik, & Ali, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.

PROFIL SINGKAT

Andi Mardaya, lahir dari pasangan Bapak Andi Syarifuddin dan Ibu (Alm) Andi Husnaeni yang merupakan anak ke empat dari 6 bersaudara. Penulis lahir di Bantaeng, 01 Maret 1989, meraih gelar Sarjana Sosial (S1 Sosiologi) di Universitas Hasanuddin Pada tahun 2015, Kemudian saat ini lagi melanjutkan studi Magister sosiologi di universitas Hasanuddin. Saat ini aktif sebagai Peneliti pada beberapa Lembaga penelitian seperti, Lembaga Demografi FEB UI, Lembaga Survey Indonesia dan Indikator Politik Indonesia.